

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan nasional merujuk pada ukuran total pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Pendapatan nasional merupakan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara dan dapat digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Geoffrey, 2005).

Pengeluaran penduduk mengacu pada pengeluaran penduduk atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi. Kebutuhan hidup semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Kebutuhan dasar dalam bertahan hidup harus dipenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Distribusi kebutuhan rumah tangga dapat diukur dari pengeluaran rumah tangga yang meliputi pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan. Secara alamiah, permintaan pangan akan mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan atau tabungan oleh karena itu, pola pengeluaran atau konsumsi dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisi penduduk dapat dijadikan sebagai indikator perubahan tingkat kesejahteraan. (Badan Pusat Statistik, 2022).

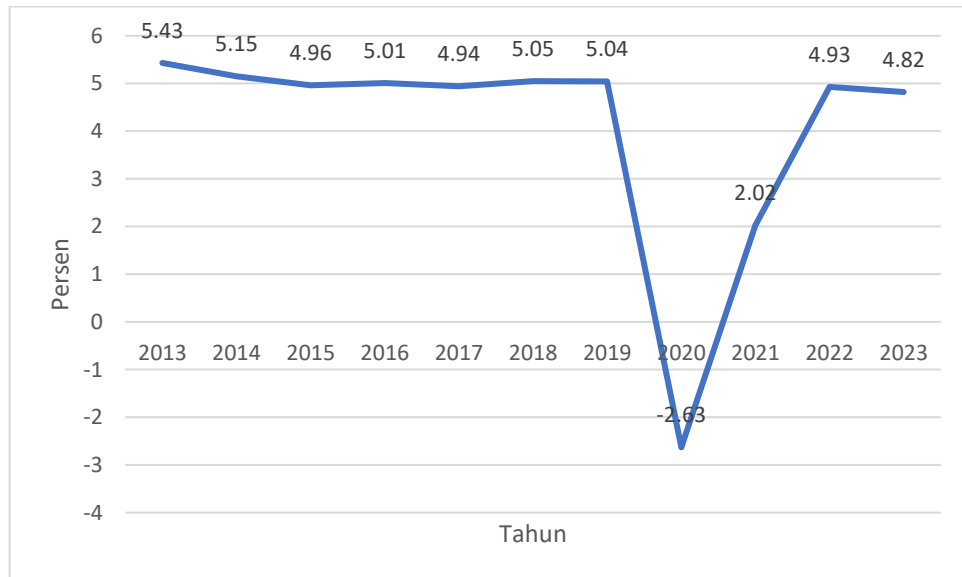
Faktor fundamental yang menentukan konsumsi seorang konsumen akan barang dan jasa mencakup pendapatan rumah tangga, ekspektasi terhadap pendapatan masa depan, kekayaan, ketersediaan dan biaya kredit, kebijakan pemerintah, serta preferensi konsumen dan faktor psikologis; di mana pendapatan rumah tangga merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi

karena kenaikan pendapatan biasanya meningkatkan konsumsi, ekspektasi pendapatan masa depan mendorong konsumsi saat ini, kekayaan meningkatkan perasaan kaya dan konsumsi, akses terhadap kredit dengan suku bunga rendah meningkatkan konsumsi, kebijakan fiskal dan moneter pemerintah mempengaruhi pendapatan yang dapat dibelanjakan, preferensi serta sikap konsumen terhadap pengeluaran dan menabung juga memainkan peran penting untuk menentukan tingkat konsumsi dalam ekonomi, dan faktor psikologis, seperti tingkat kepercayaan konsumen, dapat mempengaruhi keputusan konsumsi (Samuelson & Nordhaus 2002).

Dari sisi pengeluaran selama periode 2018-2019, kontributor terbesar untuk perekonomian Indonesia adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT). Pada tahun 2022, kontribusi komponen PK-RT sebesar 51,87 persen yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia dari sisi pengeluaran. Sementara itu, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) serta Ekspor Barang dan Jasa masing-masing berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 29,08 persen serta 24,49 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa Konsumsi memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2022).

Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makroekonomi. Dalam identitas pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran, dilambangkan dengan huruf C, inisial dari kata *consumption*. Pengeluaran seseorang adalah bagian dari pendapatannya yang dibelanjakan. Bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan, lazim dilambangkan dengan huruf S, inisial dan kata *saving* apabila pengeluaran-pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka

hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan Dumairy (1996).



Sumber : Badan Pusat Statistik diolah

Gambar 1.1 Kondisi Konsumsi Masyarakat Tahun 2013 – 2023

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan konsumsi masyarakat yang diukur menurut produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan tumbuh 4,93 persen menjadi Rp6,19 kuadriliun pada 2022 dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut tertinggi sejak terjadinya pandemi Covid-19 pada 2020, meskipun tumbuh, konsumsi rumah tangga Indonesia belum pulih dibandingkan dengan sebelum terjadi pandemi. Hal ini tecermin dari pertumbuhan konsumsi masyarakat pada tahun lalu masih lebih rendah dibanding 2019 yang berhasil tumbuh di atas 5 persen seperti terlihat pada gambar 1.1. Saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 konsumsi masyarakat selalu tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Perekonomian nasional bertumbuh 5,31 persen menjadi Rp11,71 kuadriliun pada 2022 dibanding tahun sebelumnya 2,02 persen. Tidak hanya itu, porsi konsumsi rumah tangga terhadap PDB atas dasar harga berlaku hanya mencapai 51,87 persen dari total PDB nasional senilai Rp19,59 kuadriliun

pada 2022 dan 4.82 persen pada tahun 2023. Porsi tersebut merupakan yang terendah sejak 2010 (Badan Pusat Statistik, 2022).

Pola konsumsi masyarakat dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya. Untuk keperluan analisis, secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan ke dalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan (Dumairy, 1996). Masing - masing kelompok pengeluaran konsumsi dirinci pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Daftar Alokasi Pengeluaran Konsumsi Masyarakat

A. MAKANAN	B. BUKAN MAKANAN
1. Padi-padian/ <i>Cereals</i>	1. Perumahan dan fasilitas rumah tangga <i>/Housing and household facilities</i>
2. Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	2. Aneka barang dan jasa/ <i>Goods and services</i>
3. Ikan/udang/cumi/kerang <i>Fish/shrimp/common squid/shells</i>	a. Bahan perawatan badan (sabun, pasta gigi, parfum, dsb.)
4. Daging/ <i>Meat</i>	b. Bacaan (koran, majalah, buku)
5. Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	c. Komunikasi
6. Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	d. Kendaraan bermotor
7. Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	e. Transportasi
8. Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	f. Pembantu dan sopir
9. Minyak dan kelapa/ <i>Oil and coconut</i>	3. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala <i>/Clothing, footwear, and headgear</i>
10. Bahan minuman/ <i>Beverages stuffs</i>	4. Barang tahan lama/ <i>Durable goods</i>
11. Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	5. Pajak, pungutan, dan asuransi <i>/Taxes and insurance</i>
12. Konsumsi lainnya <i>Miscellaneous food items</i>	6. Keperluan pesta dan upacara atau kenduri/ <i>Parties and ceremonies</i>
13. Makanan dan minuman jadi <i>/Prepared food and beverages</i>	
14. Rokok/ <i>Cigarettes</i>	

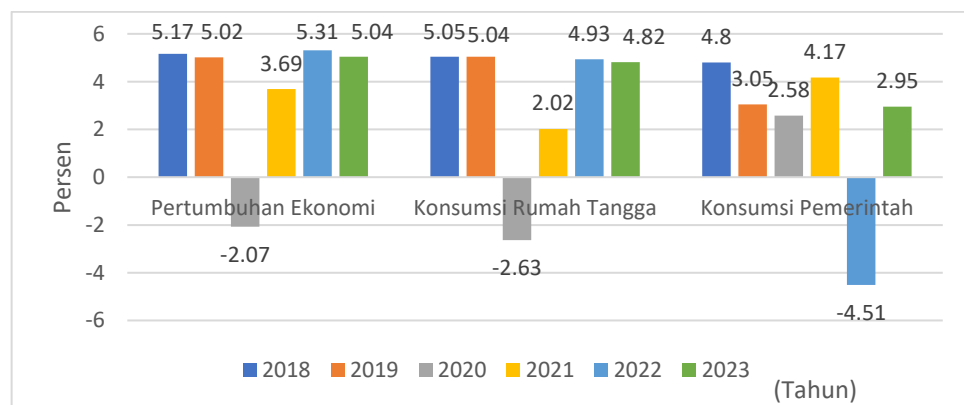
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Pada tahun 2020 menurut Bank Indonesia saat terjadinya Covid-19 berdampak pada penekanan perekonomian Indonesia. Upaya pembatasan mobilitas di Indonesia perlu dilakukan sebab ketika Indonesia mulai terkena wabah virus Covid-19, virus tersebut menyebar dengan sangat cepat ke seluruh wilayah

Indonesia. Jumlah kasus positif Covid-19 secara nasional mencapai 743.198 jiwa dengan jumlah kematian tercatat 22.138 jiwa. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 melalui penerapan kebijakan pembatasan mobilitas, termasuk penerapan protokol kesehatan dan PSBB di beberapa daerah.

Dampak Covid - 19 tidak dapat dihindari dan telah menurunkan secara tajam aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi melambat.

Berikut gambar 1.2 indikator perekonomian di bawah ini:



Sumber : Bank Indonesia diolah

Gambar 1.2 Indikator Perekonomian

Pada tabel 1.2 terlihat dimulai dari tahun 2018 sebesar 5,17 persen dan 2019 sebesar 5,02 persen menjadi - 2,07 persen (yoy) pada tahun 2020 dimana terkontraksi 5,32 persen (yoy). Ketika pertumbuhan ekonomi terkontraksi konsumsi rumah tangga turun menjadi - 2,63 persen (yoy) pada tahun 2020 dimana terkontraksi 5,04 persen (yoy). Konsumsi Pemerintah terkontraksi 0,67 persen (yoy) pada tahun 2020 menjadi 2,58 persen (yoy). Tahun 2021 hingga 2022 perekonomian Indonesia kembali meningkat dimana pertumbuhan ekonomi meningkat 5,76 persen (yoy) di tahun 2021 dan 1,62 persen (yoy) di tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5,04 persen (yoy). Pertumbuhan Ekonomi yang meningkat diikuti konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga di tahun 2021 mengalami

peningkatan 4,65 persen (yoy) di tahun 2021, 2,91 persen (yoy) di tahun 2022 dan meningkat menjadi 4,82 persen (yoy) di tahun 2023. Konsumsi Pemerintah di tahun 2021 mengalami peningkatan 1,59 persen (yoy), di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 8,68 persen yaitu – 4,51 persen (yoy), dan meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 2,95 persen (yoy) (Bank Indonesia, 2023).

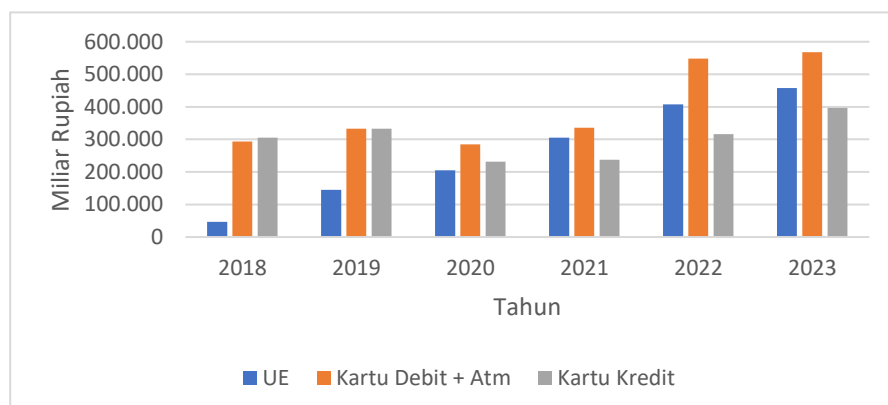
Menurut database *Global Findex 2021* di tengah perluasan layanan keuangan formal secara global pandemi Covid-19 telah mendorong pembayaran digital secara signifikan. Perluasan layanan keuangan menciptakan peluang ekonomi baru, mempersempit kesenjangan gender dalam kepemilikan rekening, dan membangun ketahanan di tingkat rumah tangga untuk mengelola guncangan keuangan dengan lebih baik. Pembayaran digital mengacu pada metode pembayaran digital yang dicapai melalui teknologi komunikasi, kecerdasan buatan, dan teknologi informasi dengan bantuan komputer, peralatan cerdas, dan peralatan perangkat keras lainnya. Sarana digital dalam hal ini terutama mencakup pembayaran elektronik, uang elektronik, dan uang digital. Definisi pembayaran elektronik relatif luas. Uang elektronik dan uang digital adalah dasar dari pembayaran elektronik, dan fungsi pembayarannya juga memerlukan pembayaran elektronik untuk diwujudkan, sehingga pembayaran elektronik sebagian besar mewakili pembayaran digital (Demirguc-Kunt et al., 2022).

Pesatnya perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran dalam transaksi bisnis terutama dalam menjaga kesinambungan hubungan bisnis para pihak. Sistem pembayaran yang merupakan salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan telah berkembang, yang semula hanya kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran kedalam

bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tanpa menggunakan uang fisik sebagai alat pembayaran melainkan dengan teknologi alat pembayaran, misalnya dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit (Tarantang et al., 2019).

Kemajuan teknologi membuat sistem pembayaran lebih maju dengan beragam aplikasi yang digunakan masyarakat sebagai sarana pembayaran non-tunai. Aplikasi pembayaran digital yang saat ini marak digunakan masyarakat antara lain ovo, go-pay, dan dana. Bank Indonesia juga meluncurkan standar nasional bagi fitur baru berupa QRIS untuk transaksi tarik tunai, transfer, dan setor tarik tunai. Kegunaan aplikasi pembayaran digital yang sudah dijelaskan mempunyai tujuan untuk mempermudah transaksi di berbagai macam aktivitas contohnya untuk pembayaran ojek online, pesan antar makanan, pembayaran tagihan listrik/telepon, pembayaran PDAM, dan masih banyak lagi kemudahan yang dihasilkan oleh sistem pembayaran digital.

Penggunaan pembayaran digital di Indonesia telah mengalami peningkatan yang pesat. Bank Indonesia mengungkapkan melalui data pada gambar 1.3 berikut :



Sumber : Bank Indonesia, 2023

Gambar 1.3 Jumlah transaksi uang elektronik, kartu debit dan atm, serta kartu kredit tahun 2018 - 2023 (Miliar rupiah)

Bank Indonesia melaporkan peningkatan transaksi keuangan digital pada tahun 2018 sampai 2023. Hal ini yang tercermin dari transaksi belanja menggunakan uang elektronik pada tahun 2018 sebesar 47.199 miliar rupiah dan tahun 2019 sebesar 145.165 miliar rupiah meningkat secara signifikan menjadi 204.909 miliar rupiah di tahun 2020 dan terus meningkat di tahun 2021 menjadi 305.436 miliar rupiah, tahun 2022 menjadi 407.534 miliar rupiah, dan tahun 2023 menjadi 457.729 miliar rupiah. Transaksi belanja menggunakan kartu debit dan atm relatif mengalami peningkatan di tahun 2018 sampai 2019 meskipun sempat turun di tahun 2020 dengan nilai 284.784 miliar rupiah namun kembali naik hingga pada puncaknya tahun 2023 menjadi sebesar 567.796 miliar rupiah. Kartu kredit juga turut berperan meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 karna covid -19, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan nilai 315.696 miliar rupiah sampai tahun 2023 menjadi 397.012 miliar rupiah. Peran Bank Indonesia turut serta dalam peningkatan transaksi digital yang terus mendorong ekonomi dan inklusi keuangan yang efisien melalui kebijakan sistem pembayaran non tunai atau *electronic money* (Bank Indonesia, 2023).

Ferra (2023) menyatakan dalam penelitiannya pertumbuhan di dalam nilai transaksi non-tunai telah terbukti mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Penurunan pertumbuhan ekonomi sejak awal pandemi Covid-19 dapat diatasi melalui kelancaran dalam transaksi atau pembayaran non tunai sehingga kebijakan uang elektronik turut memberikan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (2022) mengungkapkan bahwa Indonesia mempunyai perekonomian yang berpotensi besar untuk menyerap arus digitalisasi. Faktor pendorong pengembangan digital bank di Indonesia tercermin

dalam 3 (tiga) aspek utama yaitu peluang digital (*digital opportunity*), perilaku digital (*digital behavior*), dan transaksi digital (*digital transaction*). Peluang digital antara lain meliputi potensi demografis, potensi ekonomi dan keuangan digital, potensi penetrasi penggunaan internet, serta potensi peningkatan konsumen. Perilaku digital di antaranya meliputi kepemilikan gawai dan penggunaan aplikasi mobile (*mobile apps*). Transaksi digital meliputi transaksi perdagangan *online* (*e-commerce*), transaksi *digital banking*, dan transaksi uang elektronik. Adopsi pembayaran digital memang semakin meningkat, namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pembayaran digital terhadap konsumsi sehingga mengetahui perekonomian dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Dukungan dari pemerintah turut membantu dan menjadi regulator dalam mendorong transaksi non-tunai juga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan pembayaran digital di Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan teknologi pembayaran dalam beberapa tahun terakhir, banyak ilmuwan mulai memperhatikan pembayaran digital, dan sejumlah besar penelitian berfokus pada kemauan dan perilaku pembayaran digital, serta dampak pembayaran digital terhadap sektor industri.

Penelitian terdahulu menunjukkan pembayaran digital mengubah perilaku konsumsi masyarakat dan mempengaruhi permintaan konsumen seperti penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2021) menunjukkan variabel *E-Money* memiliki probabilitas dibawah lima persen terhadap Konsumsi Rumah Tangga, maka dapat disimpulkan variabel *E-Money* memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia dalam jangka panjang. Penelitian oleh Li et al. (2020) menunjukkan keuangan digital dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga secara signifikan.

Penelitian selanjutnya oleh Silalahi et al. (2022) menunjukkan pengguna e-payment yang menjadi informan penelitian penulis ini menggunakan e-payment yang beragam. Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan dengan adanya e-payment membuat masyarakat memiliki minat belanja di *e-commerce*. Wang dan Huang (2023) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa indeks keuangan digital mempunyai dampak signifikan dalam memfasilitasi pembelian konsumen online. Negara-negara yang memiliki tingkat perkembangan keuangan digital yang lebih tinggi cenderung memiliki volume penjualan online yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan digital berpengaruh terhadap tingkat konsumsi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah disebutkan, penelitian mengenai hubungan antara pembayaran digital dan permintaan konsumen masih sedikit. Kontribusi konsumsi terhadap PDB Indonesia menyumbang mayoritas atau 53,31 persen dari total pertumbuhan domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II-2023. Komponen ini tumbuh 5,32 persen secara tahunan (yoy) (Badan Pusat Statistik, 2023). pembayaran digital sebagai salah satu bagian penting dalam proses konsumsi dapat dikatakan mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap permintaan konsumen namun perkembangan pembayaran digital apakah berdampak pada permintaan konsumen dan bagaimana dampaknya jika dihubungkan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan sejauh ini, belum ada konsensus dan lebih banyak kontroversi di kalangan teoritis, dan ini masih menjadi isu yang beredar.

Tujuan utama dari penelitian adalah untuk mempelajari bagaimana pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pembayaran digital dapat meningkatkan permintaan konsumen dalam konteks pasca pandemi Covid-19, dampak buruknya terhadap perekonomian global, dan tantangan besar terhadap

pembangunan ekonomi berkelanjutan yang terdiri dari tiga pilar yaitu pilar ekonomi berupa PDRB, pilar sosial berupa kualitas pembangunan manusia dan urbanisasi, dan pilar lingkungan berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Dalam perspektif pembangunan ekonomi berkelanjutan, berdasarkan teori konsumsi, teori pembangunan berkelanjutan, dan pembayaran digital penelitian ini mencoba membangun model panel. Dalam tulisan ini, data diambil dari tahun 2020 – 2023 dengan indikator terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan, pembayaran digital dan permintaan konsumsi masyarakat dipilih untuk menguji pengaruh pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pembayaran digital terhadap permintaan konsumsi masyarakat, sehingga dapat mengungkap dampaknya terhadap permintaan konsumsi masyarakat dan mengajukan saran kebijakan yang relevan.

Riset Gap tercermin dalam aspek-aspek berikut: (1) perspektif penelitiannya baru, dan keterkaitan pembayaran digital terhadap permintaan konsumen dipelajari dari perspektif pembangunan berkelanjutan; (2) dalam konteks dampak Covid-19, diusulkan bagaimana mendorong permintaan konsumen melalui pembayaran digital dan pembangunan ekonomi berkelanjutan; (3) berbeda dengan kajian penelitian sebelumnya yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen, tulisan ini lebih menekankan pada analisis empiris dan mengungkap faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan konsumen melalui uji empiris.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaruh pembangunan ekonomi berkelanjutan terhadap permintaan konsumsi di Indonesia?.

- 2) Bagaimana pengaruh pembayaran digital terhadap permintaan konsumsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis bagaimana pembangunan ekonomi berkelanjutan terhadap permintaan konsumsi di Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis bagaimana pengaruh pembayaran digital terhadap permintaan konsumsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman mengenai pembangunan ekonomi berkelanjutan, pembayaran digital dan pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi masyarakat di Indonesia

- 2) Manfaat Praktis

1. Bagi kalangan akademisi,

hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi, bahan rujukan, dan referensi untuk penelitian berikutnya. Memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat digunakan dalam berinovasi dalam meningkatkan tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Praktisi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan lembaga keuangan yang terkait, guna memperluas wawasan dan khasanah keilmuan tentang pembangunan ekonomi

berkelanjutan dan pembayaran digital dalam perkembangan perekonomian negara.

3. Bagi Pengambil Kebijakan

Penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada pengambil kebijakan mengenai pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pembayaran digital guna pengembangan perekonomian negara melalui peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.